

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 merupakan dokumen sebagai dasar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta mempunyai orientasi pada hasil yang diharapkan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, Dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2023, untuk mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu serta perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

Bangkalan,

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANGKALAN



WIBAGIO SUHARTA, S.Sos. MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19730126 199302 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
 Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	27
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
 Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	42
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	43
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	44
3.3. Program dan Kegiatan.....	
Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	45
BAB V PENUTUP	55

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Rencana Kinerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya akan diproses menjadi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bangkalan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 ini berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dan evaluasi kinerja di tahun sebelumnya dan diharapkan bisa memicu kinerja pada tahun yang akan datang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja 2023 Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- f. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sosial Tahun 2020 - 2024;

- g. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029 (Lembaga Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E)
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 1 Seri E Tambahan Lembaran daerah Nomor 76);
- l. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
- m. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 47 E)
- n. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 41 tahun 2016 kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan 2023 adalah memberikan gambaran strategis tentang arah program kerja, rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 1 (satu) tahun kedepan

Sedangkan tujuan penyusunan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja 2023 yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 serta evaluasi kinerja di tahun 2022 dapat memicu pada rencana kerja tahun yang akan datang.
2. Memberikan arah pembangunan urusan Sosial di Kabupaten Bangkalan selama 1 (satu) tahun kedepan.
3. Membantu dalam mencapai visi dan misi Dinas Sosial dan Kabupaten Bangkalan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, RENSTRA 2018-2023 dan RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 2023 maka dapat ditetapkan Sistematika penulisan dengan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja, Proses Penyusunan Renja, Keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra PD dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi Renja Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2020 dan perkiraan target tahun 2021.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial
dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program/Kegiatan pada akhir periode renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan (output) s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	<i>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</i>									
1.06	<i>Urusan Sosial</i>									
1.06.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persentase anak terlantar, disabilitas dan lansia bermasalah sosial yang terlayani	3,1	3,47 %	2,7 %	69,1 %	2557,85	2,8 %	75 %	24,3

1.06.01.1 6.14	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut usia	Jumlah anak terlantar dan lansia yang terlayani dan di rehab	320	58 orang	363 orang 4	363 orang 4	100,0 0	64 orang	3.756 orang	11,7
1.06.01.1 6.15	Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial	Jumlah tuna sosial dilayani dan direhabilitasi	635	161 orang	60 orang	18 orang	30,00	127 orang	306 orang	0,5
1.06.01.1 6.16	Pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas	Jumlah disabilitas yang terlayani dan direhabilitasi	199	36 orang	38 orang	0 orang	0,00	40 orang	76 orang	0,4
1.06.01.2 3	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Fakir miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	0,6	0,5 %	0,6 %	3 %	6,62	0,6 %	4 %	6,0
1.06.01.2 3.01	Penanganan Fakir Miskin	Jumlah fakir miskin yang dibina	663	120 orang	0 orang	0 orang	#DIV/0!	132 orang	252 orang	0,4
		Jumlah keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	3.481	1.260 orang	132 orang 93	132 orang 93	100,0 0	695 orang	15.248 orang	4,4
		Dokumen penerima rastra	5	2 dok	1 dok	1 dok	100,0 0	1 dok	4 dok	0,8
1.06.01.2 3.02	Kepahlawanan , keberintisan dan kesetiakawanan sosial	Jumlah sarana yang dipelihara	5	2 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100,0 0	1 lokasi	4 lokasi	0,8
		Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional	2 keg	4 keg	2 keg	0 keg	0,00	2 keg	6 keg	#VALUE!

1.06.01.2 3.03	Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat dan pengelolaan sumber daya sosial	Jumlah lembaga yang dibantu	28	0	yaya san	0	yaya san	0	yaya san	#DIV/ 0!	6	yayasa n	6	yayasa n	0,2
		Jumlah TKSK yang terbina	90	36	orang	18	orang	18	orang	100,0 0	18	orang	72	orang	0,8
1.06.01.2 3.04	Pelestarian terhadap nilai-nilai kepahlawanan	peserta sosialisasi nilai-nilai kepahlawanan	216	0	orang	100	orang	0	orang	0,00	50	orang	50	orang	0,2
1.06.01.2 4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial	100	153 ,54	%	100	%	53, 54	%	100	100	%	307	%	3,1
1.06.01.2 4.01	Perlindungan sosial korban bencana alam	persentase korban bencana alam yang dibantu	100 %	56	%	100	%	100	%	100,0 0	100	%	256	%	256,0
		Jumlah daerah rawan bencana kekeringan yang dibantu	445	98	desa	89	desa	38	desa	42,70	89	desa	225	desa	0,5
1.06.01.2 4.02	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dokumen penerima KPM	5	2	dok	1	dok	1	dok	100,0 0	1	dok	4	dok	0,8
		Data kemiskinan	5	2	dok	1	dok	0	dok	0,00	1	dok	3	dok	0,6

1.06.01.2 4.03	Perlindungan sosial korban bencana sosial	% korban bencana sosial yang dibantu	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	300 %	300,0
1.06.01.2 5	Program Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	6	6 %	6 %	0 %	0	6 %	12 %	2,0
1.06.01.2 5.01	Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Jumlah LKS yang dibantu	28	5 lembaga	5 lembaga	0 lembaga	0,00	6 lembaga	11 lembaga	0,4
1.06.01.2 5.02	Pengembangan Publikasi dan Penyuluhan Sosial	Jumlah PSM yang telah dibina	277	180 org	80 org	0 org	0,00	55 org	235 org	0,8
1.06.01.2 5.03	Pengembangan Kerja sama dan Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang dibina	110	70 org	50 org	0 org	0,00	22 org	92 org	0,8
00.00.16	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	100	100 %	100 %	100 %	100,0	100 %	300 %	3,0

0.00.16.0 1	Penyediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan	35	14 jenis	7 jenis	7 jenis	7	7 jenis	28 jenis	0,8
		Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan	45	18 jenis	9 jenis	9 jenis	100	9 jenis	36 jenis	0,8
0.00.16.0 2	Kedinasan dalam daerah dan luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan	155	25 kali	25 kali	20 kali	80,0	30 kali	75 kali	0,5
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan	380	60 kali	80 kali	65 kali	81,3	80 kali	205 kali	0,5
0.00.16.0 3	Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun	64	2 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	100,0	14 dokumen	30 dokumen	0,5
0.00.16.0 4	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah jenis sarana aparatur yang dipelihara	20	16 jenis	3 jenis	3 jenis	100,0	3 jenis	22 jenis	1,1
		Jumlah jenis prasarana aparatur yang dipelihara	5	2 unit	1 unit	1 unit	100,0	1 unit	4 unit	0,8
0.00.16.0 5	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan	5	9 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100,0	0 Jenis	11 Jenis	2,2
		Jumlah prasarana aparatur yang diadakan	2	4 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0!	1 unit	5 unit	2,5

0.00.16.06	Peningkatan disiplin pegawai	Jumlah pakaian aparaturnya dan kelengkapan yang diadakan	400	0 buah	92 buah	92 buah	100,0	100 buah	192 buah	0,5
0.00.16.07	Peningkatan kapasitas aparaturnya	Jumlah aparaturnya yang mengikuti pelatihan/bimtek/sosialisasi/seminar	40	5 orang	7 orang	0 orang	0,0	100 orang	105 orang	2,6
0.00.16.08	Penyusunan perencanaan dan informasi PD	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	14	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100,0	3 dokumen	9 dokumen	0,6
		Jumlah dokumen penganggaran yang tersusun (RKA dan DPA)	20	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100,0	4 dokumen	12 dokumen	0,6
0.00.16.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja PD	Jumlah laporan triwulan & semesteran monev PD yang tersusun (Renja/RKPD, APBD)	46	12 laporan	8 laporan	8 laporan	100,0	8 laporan	28 laporan	0,6
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun	5	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100,0	1 laporan	4 laporan	0,8
0.00.16.10	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun per semester/prognosis/akhir tahun	2	3 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	#DIV/0!	0 dokumen	3 dokumen	1,5

		Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulanan/semesteran	264	0 laporan	66 laporan	66 laporan	100,0	66 laporan	132 laporan	0,5
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun	4	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,0	1 dokumen	3 dokumen	0,8
0.00.16.11	Fasilitasi peringatan hari jadi kabupaten/Provinsi	Jumlah kegiatan peringatan hari jadi dan hari besar yang difasilitasi	9	2 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	#DIV/0!	2 kegiatan	4 kegiatan	0,4

PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 DAN KEPMENDAGRI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020

1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	29 %					14 %	7,69 %	26,53
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	29 %					14 %	7,69 %	26,53

1.06.02.2 .03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang telah dibina	100 orang					- orang	orang	0,00
1.06.02.2 .03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang dibina	18 orang					18 orang	18 orang	100,00
1.06.02.2 .03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan hasil monitoring	5 laporan					1 laporan	1 laporan	20,00
1.06.02.2 .03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang dibantu	12 lembaga					6 lembaga	6 lembaga	50,00

1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100	%							2,8	%	0,16	%	0,16
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	200	orang							104	orang	104	orang	52,00

1.06.04.2 .01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Keluarga Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar yang dibimbing	130 orang					64 orang	64 orang	49,2 3
		Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas yang dibimbing	70 orang					40 orang	40 orang	57,1 4
1.06.04.2 .01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Laporan masyarakat miskin yang difasilitasi dalam SLRT	3 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	33,3 3
1.06.04.2 .02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	140 orang					127 orang	27 orang	19,2 9

1.06.04.2 .02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang dibimbing	139 orang					127 orang	27 orang	19,4 2
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial	100 %					100 %	#REF! %	#REF!
1.06.05.2 .02	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase keluarga fakir miskin yang didata dan difasilitasi</i>	100 %					100 %	91,37 %	91,37
1.06.05.2 .02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial	5940 orang					8.231 orang	7.521 orang	126,62
1.06.05.2 .02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen DTKS	5 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	20,00

		Laporan hasil monitoring dan evaluasi PKH	6	laporan					1	dokumen	0	dokumen	0,00
1.06.06	PROGRAM PENANGANA N BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya	100	%					100	%	100	%	100,00
1.06.06.2.01	<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kot a</i>	<i>Persentase korban bencana alam dan sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya</i>	100	%					100	%	100	%	100,00
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Persentase korban bencana alam yang difasilitasi kebutuhan dasarnya	100	%					100	%	100	%	100,00
		Persentase korban bencana sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya	100	%					100	%	100	%	100,00
1.06.06.2.02	<i>Penyelenggara an Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kot a</i>	<i>Persentase Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang difasilitasi</i>	100						100	%	100	%	100,00

1.06.06.2 .02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	85 orang					25 orang	25 orang	29,4 1
1.06.07	PROGRAM PENGELOLA AN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	% Taman Makam Pahlawan yang terkelola	100 %					100 %	100 %	100, 00
1.06.07.2 .01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kot a	% Taman Makam Pahlawan terpelihara	100 %					100 %	100 %	100, 00
1.06.07.2 .01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dipelihara	1 lokasi					1 lokasi	1 lokasi	100, 00
1.06.07.2 .01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional	2 kegiat an					2 kegiata n	2 kegiata n	100, 00

1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100	%					100	%	100	%	100,00
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang terlaksana</i>	100	%					100	%	100	%	100,00
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	9	dokumen					3	dokumen	3	dokumen	33,33
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	6	dokumen					2	dokumen	2	dokumen	33,33
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	6	dokumen					2	dokumen	2	dokumen	33,33

1.06.01.2 .01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	3 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	33,33
1.06.01.2 .01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	24 laporan					8 laporan	8 laporan	33,33
1.06.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100 %					100 %	100 %	100,00
1.06.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	49 orang					49 orang/bulan	49 orang/bulan	100,00
1.06.01.2 .02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	3 laporan					1 laporan	1 laporan	33,33
1.06.01.2 .02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD yang tersusun	198 laporan					66 laporan	66 laporan	33,33

1.06.01.2 .03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100 %					100 %	100 %	100,00
1.06.01.2 .03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42 laporan					14 laporan	14 laporan	33,33
1.06.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %					100 %	100 %	100,00
1.06.01.2 .05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 unit					0 unit	0 unit	0,00
1.06.01.2 .05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	270 buah					90 buah	90 buah	33,33
1.06.01.2 .05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bimtek/sosialisasi/seminar	185 orang					0 orang	0 orang	0,00

1.06.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %					100 %	100 %	100, 00
1.06.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	132 unit					44 unit	41 unit	31,0 6
1.06.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57 unit					0 unit	unit	0,00
1.06.01.2 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	495 unit					165 unit	155 unit	31,3 1
1.06.01.2 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 jenis					4 jenis	4 jenis	33,3 3
1.06.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6 jenis					2 jenis	2 jenis	33,3 3

1.06.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6 jenis					1 jenis	1 jenis	16,67
1.06.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330 kali					1 kali	1 kali	0,30
1.06.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %					100 %	100 %	100,00
1.06.01.2 .07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	39 unit					26 unit	26 unit	66,67
1.06.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %					100 %	100 %	100,00

1.06.01.2 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 jenis					2 jenis	2 jenis	100, 00
1.06.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9 jenis					4 jenis	4 jenis	44,4 4
1.06.01.2 .08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 jenis					2 jenis	2 jenis	100, 00
1.06.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9 jenis					4 jenis	4 jenis	44,4 4
1.06.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %					100 %	100 %	100, 00
1.06.01.2 .09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	12 unit					2 unit	2 unit	16,6 7

	Dinas Jabatan									
1.06.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	76 unit					17 unit	17 unit	22,3 7
1.06.01.2 .09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	16 unit					0 unit	0 unit	0,00
1.06.01.2 .09.09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi	4 unit					0 unit	0 unit	0,00
1.06.01.2 .09.10	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	197 unit					17 unit	10 unit	5,08

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Evaluasi Perangkat Daerah

N o.	Indikator	SPM / Stand ar Nasio nal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catat an Anali sis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	7	8			9	10	11	12	13
1	Indikator Tujuan											
1	Jumlah PMKS			567.205	567.111	566.999	566.869	501.674	638.972	567.111	566.999	
2	Meningkatnya Kinerja Urusan Sosial			0	100%	100%	100%	0	75,34	100%	100%	
	Indikator Sasaran											
1	Persentase PMKS yang dibina dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya			7,81	8,93	10,04	11,16	7	7,9	10,04	11,16	
2	Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial			0	14%	19%	24%	0	7,69 %	19%	24%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Keterbatasan sumber daya manusia dan kelembagaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
2. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3. Keterbatasan sumberdana pembiayaan dalam penanganan kesejahteraan sosial
4. Keterbatasan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Kompleksitas permasalahan PMKS yang membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi serta kerja sama dengan lembaga lain/lintas sektoral (sesuai dengan UU. No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan UU No. 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin)

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	8.126.491.142	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	8.379.851.342	
A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang terlaksana	100 %	80.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang terlaksana	100 %	57.500.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3 dokumen	35.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	25.000.000	

2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	2 dokumen	7.500.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	7.500.000	
3	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	2 dokumen	7.500.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	5.000.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	2 dokumen	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	5.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	2 dokumen	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	5.000.000	

6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 dokumen	7.500.000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8 laporan	7.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 laporan	5.000.000	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	4.617.906 .640	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	4.328.564 .642	
8	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	49 orang	4.587.906 .640	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 orang/bulan	4.308.564 .642	
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah bahan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 berkas	7.500.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang tersusun	1 laporan	7.500.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	5.000.000	

1 1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	5.000.000	
1 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan PD mingguan/bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	66 laporan	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	5.000.000	
C	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100 %	15.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100 %	4.932.510	
1 3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	1 laporan	7.500.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.500.000	
1 4	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 laporan	7.500.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 laporan	2.432.510	

D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %	200.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %	240.630.350	
15	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai		Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	15.000.000	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	3.149.550	
16	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	90 buah	50.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 paket	63.750.000	
17	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang tersusun	7 laporan	7.500.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	3.106.800	
18	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun	12 laporan	7.500.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	6.000.000	
19	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan / bimtek / sosialisasi / seminar	90 orang	120.000.000	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90 orang	164.624.000	

E	Administrasi Umum Perangkat daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	398.134.502	Administrasi Umum Perangkat daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	434.482.240	
20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44 unit	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 paket	6.140.000	
21	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19 unit	35.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	48.542.240	
22	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	165 unit	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 paket	6.690.000	
23	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 jenis	83.134.502	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	68.616.000	
24	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 jenis	50.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 paket	21.750.000	
25	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 jenis	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	24 dokumen	5.520.000	

26	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 kali	15.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	85 Laporan	14.875.000	
27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 kali	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	207.149.000	
28	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang tersusun	1 laporan	50.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	55.200.000	
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 %	750.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 %	516.894.600	
29	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan	39 unit	750.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	42 unit	302.900.600	
30						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	5 unit	193.180.000	

3 1						Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5 unit	20.814.000	
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.310.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.595.552.000	
3 2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 jenis	0						
3 3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 jenis	130.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	111.102.000	
3 4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 jenis	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Laporan	304.500.000	
3 5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 jenis	1.180.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	1.179.950.000	

H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	755.450.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	1.201.295.000	
36	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	3 unit	350.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 unit	207.460.000	
37	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	19 unit	315.030.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	177.000.000	
38	Pemeliharaan mebel		Jumlah Mebel yang dipelihara	4 unit	1.420.000	Pemeliharaan mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	16 unit	2.900.000	
39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	60.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	784.935.000	

40	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	63 unit	29.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	63 unit	29.000.000	
II	Program Pemberdayaan Sosial		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	24 %	860.000.000	Program Pemberdayaan Sosial		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	24 %	650.000.000	
I	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	24 %	860.000.000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	24 %	650.000.000	
41	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah (Pekerja Sosial Masyarakat) PSM yang telah dibina	50 orang	50.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	58.500.000	

4 2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah TSK yang dibina	18 orang	250.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	18 orang	150.000.000	
4 3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Laporan hasil monitoring	2 laporan	500.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7000 Keluarga	150.000.000	
4 4	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang dibina	50 orang	60.000.000	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11 lembaga	291.500.000	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang dibantu	6 lembaga							

III	Program Rehabilitasi Sosial		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100	%	1.215.000.000	Program Rehabilitasi Sosial		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100	%	1.468.401.400	
J	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	175	orang	1.090.000.000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	220	orang	1.345.506.850	
4 5	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Keluarga Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar yang dibimbing	115	orang	90.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	220	orang	450.000.000	
			Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas yang dibimbing	60	orang								

4 6	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Laporan masyarakat miskin yang difasilitasi dalam SLRT	1 doku men	1.000.000 .000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan kewenangan Kabupaten/Kota	orang	895.506.8 50	
K	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	140 orang	125.000.0 00	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	40 orang	122.894.5 50	
4 7	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza		Jumlah Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang dibimbing	139 orang	125.000.0 00	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	122.894.5 50	

IV	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial	100 %	2.800.000.000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial	100 %	2.050.000.000	
L	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase keluarga fakir miskin yang didata dan difasilitasi	1 %	2.800.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase keluarga fakir miskin yang didata dan difasilitasi	1 %	2.050.000.000	
48	Pendataan Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota		Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial	1.980 orang	2.000.000.000	Pendataan Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata	400.000 orang	800.000.000	
49	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen DTKS	2 dokumen	800.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1000 Keluarga	1.250.000.000	
			Laporan hasil monitoring dan evaluasi PKH	2 laporan							
			Laporan hasil rekonsiliasi bansos PKH	1 laporan							
			SDM PKH yang difasilitasi	250 orang							
50						Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7.000 Keluarga		

V	Program Penanganan Bencana		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	%	750.000.000	Program Penanganan Bencana		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	%	1.336.147.900	
M	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota		Persentase korban bencana alam dan sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya	100	%	500.000.000	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota		Persentase korban bencana alam dan sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya	100	%	1.081.354.350	
51	Penyediaan makanan		Persentase korban bencana alam yang difasilitasi kebutuhan dasarnya	100	%	500.000.000	Penyediaan makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	600	Orang	1.081.354.350	
			Persentase korban bencana sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya	100	%								
N	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang difasilitasi	100	%	250.000.000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang difasilitasi	100	%	254.793.550	

5 2	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana		Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	30 orang	250.000.000	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	254.793.500	
VI	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		% Taman Makam Pahlawan yang terkelola	100 %	350.000.000	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		% Taman Makam Pahlawan yang terkelola	100 %	217.090.500	
O	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota		% Taman Makam Pahlawan terpelihara	100 %	350.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota		% Taman Makam Pahlawan terpelihara	100 %	217.090.500	
5 3	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota		Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dipelihara	1 lokasi	200.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	50 Makam	151.149.000	
5 4	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional	2 kegiatan	150.000.000	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 Laporan	65.941.500	
				Jumlah	14.101.491.142				Jumlah	14.101.491.142	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Tahun 2023 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Timur, dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Sosial dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu program yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara umum khususnya Dinas Sosial.

Proses penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2023 didasarkan pada program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2023, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Tabel 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi

Perkembangan kemiskinan yang menggambarkan dinamika kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, dipengaruhi oleh berbagai faktor secara simultan termasuk perkembangan perekonomian Indonesia, integrasi perekonomian Indonesia secara global, perubahan demografi, dan kebijakan afirmatif yang dilaksanakan. Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, tingkat kemiskinan berhasil diturunkan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan dalam bentuk 4 kelompok program (klaster), yaitu bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro kecil dan program-program pro rakyat telah berjalan dengan cukup baik. Meskipun demikian kecepatan penurunan kemiskinan mengalami perlambatan.

Dalam rangka penurunan kemiskinan tersebut, pertumbuhan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat serta perubahan struktur perekonomian Indonesia memiliki 2 konsekuensi penting, yaitu (1) penduduk golongan menengah kebawah akan semakin membutuhkan sistem perlindungan yang komprehensif; dan (2) adanya potensi meningkatnya kesenjangan antar kelompok miskin dan non miskin yang menjadikan masalah sosial semakin kompleks.

Perlindungan sosial diperlukan agar penduduk miskin dan rentan dilindungi pemenuhan kebutuhannya, terutama pelayanan kesehatan dan kebutuhan bahan pokok, apabila terjadi goncangan ekonomi maupun sosial. Dalam mengurangi potensi kesenjangan antar kelompok maka perlu dilakukan upaya perluasan akses terhadap pelayanan dasar. Sedangkan upaya yang bisa dilakukan untuk mengurai kompleksitas permasalahan kemiskinan dengan pembekalan keterampilan wirausaha maupun keterampilan teknis kepada penduduk miskin dan rentan, sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka melalui kegiatan ekonomi produktif.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan Misi Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2023.

Tujuan Renja Dinas Sosial

1. Menurunnya PMKS/PPKS dalam rangka berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan
2. Meningkatnya Kinerja Urusan Sosial

Sasaran Renja Dinas Sosial

1. Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS
2. Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3. Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

TUJUAN				SASARAN				KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
		2023	2024			2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Menurunnya PMKS/PPKS dalam rangka berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan	Jumlah PMKS/PPKS	566.999 orang	566.999 orang	Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PMKS/PPKS	Persentase PMKS/PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya	10,04	10,04	
				Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	24	29	
Meningkatnya Kinerja Urusan Sosial	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Sosial	87%	89%	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan internal layanan kesekretariatan	100	100	

3.3. Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 telah mempertimbangkan beberapa factor antara lain :

1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, yaitu :

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangkalan yang religius dan sejahtera berbasis potensi lokal

Misi : Menyelenggarakan Pelayanan Dasar Berkualitas dan Tata Kelola Pemanfaatan Potensi Ekonomi, Sosial, dan Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah

2. Sesuai dengan kebijakan nasional, yaitu SPM Urusan Sosial

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan pada tahun 2023 terdapat 6 Program, 15 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan dengan total pagu indikatif Rp. 10.762.996.180

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai dinas daerah yang melaksanakan pembangunan di bidang sosial, Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan dituntut untuk menghasilkan kegiatan yang menunjang pembangunan daerah yang berkualitas.

4.1. Program dan kegiatan Dinas Sosial tahun 2023 :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023
Dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)				CATAT AN PENTIN G	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			LOKA SI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBE R DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan		100 %	6.815.397.51 9			100 %	6.961.026.71 9
1.06.01.2.01	Perencanaan, Pengggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, pengggaran dan evaluasi kinerja yang terlaksana		100 %	24.695.000			100 %	52.724.450
1.06.01.2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 dokumen	6.970.550	DAU M		4 dokumen	35.000.000
1.06.01.2.01. 02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 dokumen	4.000.000	DAU M		2 dokumen	4.000.000

1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2 dokumen	4.000.000	DAU M		2 dokumen	4.000.000
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 dokumen	0	DAU M		0 dokumen	0
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 dokumen	0	DAU M		0 dokumen	0
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	4.895.450	DAU M		1 Laporan	4.895.450
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8 laporan	4.829.000	DAU M		8 laporan	4.829.000
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi		100 %	4.073.687.930			100 %	4.073.687.930

1.06.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		49 orang/bulan	4.058.193.680	DAU M		49 orang/bulan	4.058.193.680
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	4.557.600	DAU M		1 Dokumen	4.557.600
1.06.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 Dokumen	3.719.150	DAU M		1 Dokumen	3.719.150
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 laporan	4.000.000	DAU M		1 laporan	4.000.000
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		18 laporan	3.217.500	DAU M		18 laporan	3.217.500
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun		100 %	5.235.950			100 %	5.235.950

1.06.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	2.760.200	DAU M		1 Dokumen	2.760.200
1.06.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		14 laporan	2.475.750	DAU M		14 laporan	2.475.750
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana		100 %	13.573.550			100 %	133.573.550
1.06.01.2.05.01	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		1 unit	3.149.550	DAU M		1 unit	3.149.550
1.06.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0 paket	0	DAU M		0 paket	0
1.06.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		1 Dokumen	3.613.100	DAU M		0 Dokumen	3.613.100
1.06.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		12 Dokumen	6.810.900	DAU M		12 Dokumen	6.810.900
1.06.01.2.05.11	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		0 orang	0	DAU M		90 orang	120.000.000

1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	499.473.509			100 %	499.473.509
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		12 paket	3.819.750	DAU M		12 paket	3.819.750
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		12 Paket	60.383.365	DAU M		12 Paket	60.383.365
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		12 paket	7.278.600	DAU M		12 paket	7.278.600
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		12 Paket	92.747.794	DAU M		12 Paket	92.747.794
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		2 paket	21.750.000	DAU M		2 paket	21.750.000
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan		24 dokumen	47.520.000	DAU M		24 dokumen	47.520.000
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		85 Laporan	14.875.000	DAU M		85 Laporan	14.875.000

1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50	Laporan	195.899.000	DAU M		50	Laporan	195.899.000
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1	Dokumen	55.200.000	DAU M		1	Dokumen	55.200.000
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana		100	%	193.346.120			100	%	143.909.330
1.06.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan		0	unit	0	DAU M		0	unit	0
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		0	unit	0	DAU M		5	unit	2.900.000
1.06.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		14	unit	193.346.120	DAU M		14	unit	141.009.330
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	%	1.350.722.000			100	%	1.350.722.000

1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		12 Laporan	111.102.000	DAU M		12 Laporan	111.102.000
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		2 Laporan	208.500.000	DAU M		2 Laporan	208.500.000
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		12 Laporan	1.031.120.000	DAU M		12 Laporan	1.031.120.000
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana		100 %	654.663.460			100 %	701.700.000
1.06.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		14 unit	242.800.000	DAU M		14 unit	242.800.000
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		10 unit	177.000.000	DAU M		10 unit	177.000.000
1.06.01.2.09.05	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		16 unit	2.900.000	DAU M		16 unit	2.900.000

1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		1 unit	50.000.000	DAU M		1 unit	50.000.000
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		63 unit	181.963.460	DAU M		63 unit	229.000.000
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		24,00 %	345.861.550			24,00 %	445.861.550
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina		24 %	345.861.550			24 %	445.861.550
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang	0	DAU M		70 orang	100.000.000
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		18 orang	135.069.050	DAU M		18 orang	135.069.050

1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		7000	Keluarga	108.652.000	DAU M		7000	Keluarga	108.652.000
1.06.02.2.03.04	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		1	lembaga	102.140.500	DAU M		1	lembaga	102.140.500
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti		100	%	1.284.875.091			100	%	1.284.875.091
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		800	orang	1.137.155.191			800	orang	1.137.155.191
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		800	orang	421.774.000	DAU M		800	orang	421.774.000

1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan kewenangan Kabupaten/Kota		2000 orang	715.381.191	DAU M		2000 orang	715.381.191
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		40 orang	147.719.900			40 orang	147.719.900
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota		40 orang	147.719.900	DAU M		40 orang	147.719.900
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial		100 %	1.124.727.100			100 %	1.101.912.500
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga fakir miskin yang didata dan difasilitasi		100 %	1.124.727.100			100 %	1.101.912.500

1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata		400.000 orang	400.000.000	DAU M		400.000 orang	400.000.000
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		980 Keluarga	200.974.750	DAU M		1000 Keluarga	200.974.750
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		2500 Keluarga	523.752.350	DAU M		2500 Keluarga	500.937.750
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100 %	1.029.391.120			100 %	1.029.391.120
1.06.06.2.01	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya		100 %	834.277.420			100 %	834.277.420
1.06.06.2.01.01	Penyediaan makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		425 orang	834.277.420	DAU M		425 orang	834.277.420

1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang difasilitasi		100 %	195.113.700			100 %	195.113.700
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		24 orang	195.113.700	DAU M		24 orang	195.113.700
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola		100 %	162.743.800			100 %	162.743.800
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan terpelihara		100 %	162.743.800			100 %	162.743.800
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota		50 Makam	126.149.000	DAU M		50 Makam	126.149.000
1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		2 Laporan	36.594.800	DAU M		2 Laporan	36.594.800
					10.762.996.180				10.985.810.780

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan 2018 – 2023 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Bangkalan, serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan maupun dengan perangkat daerah yang membidangi fungsi lain.

Oleh karena eskalasi permasalahan sosial yang terus berkembang maka diperlukan reposisi prioritas dan arah pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangkalan, maka pada tahun 2023 lebih difokuskan pada program sebagai berikut :

- a. Program Pemberdayaan Sosial
- b. Program Rehabilitasi Sosial
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Program Penanganan Bencana

Prioritas tersebut di atas penting untuk mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2023, karena terkait dengan hal tersebut akan menimbulkan implikasi sebagai berikut :

1. Bahwa penanganan dan pelayanan sosial terhadap PMKS sesungguhnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan indeks pembangunan manusia. Oleh karenanya peningkatan penyediaan alokasi anggaran untuk

penanganan kemiskinan menjadi sangat strategis dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

2. Program-program penanganan PMKS pada hakekatnya merupakan upaya untuk mencegah berkembang dan mengurangi populasi PMKS sekaligus menekan eksese-eksese yang ditimbulkan. Oleh karenanya Program tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan, terpadu dan didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai.
3. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari bencana alam, bencana sosial maupun bencana teknologi perlu disiapkan sebuah sistem pengelolaan pencegahan dan penanganan bencana secara terpadu. Oleh karenanya sistem pencegahan dini melalui pengembangan manajemen pengelolaan bencana berbasis masyarakat yang salah satunya adalah pembinaan terhadap TAGANA (Taruna Siaga Bencana), TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), serta penguatan kelembagaan dalam pengelolaan bencana harus dilakukan.
4. Dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan yang profesional dan manusiawi dibutuhkan dukungan sarana dan prasana yang memadai.

Selain persoalan terkait dengan program prioritas kesejahteraan sosial di atas hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa penyediaan pelayanan harus merespon perubahan paradigma dan trend permasalahan sosial yang berkembang. Oleh karena itu diperlukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pembangunan kesejahteraan sosial harus berorientasi pada pembangunan yang berbasis masyarakat (*community base*).
2. Peningkatan kualitas aparatur dalam penyiapan pelayanan dan perlindungan bagi korban tindak kekerasan, korban trafficking, korban penelantaran dan eksploitasi serta kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Demikian Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan tahun 2023 ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan penganggaran pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2023.

Bangkalan,

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Bangkalan



WIBAGIO SUHARTA, S.Sos. MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 197301261993021001